

Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes

Abdulloh Khamadi¹, Chamid Sutikno², Indah Ayu Permana Pribadi³

¹²³ Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto; Indonesia

Correspondence e-mail*, adullohkhamadi790@gmail.com, sutiknochamid@gmail.com,
iap.pribadi@unupurwokerto

Submitted:

Revised: 2024/07/01;

Accepted: 2024/07/11; Published: 2024/10/08

Abstract

The establishment of BUMDes basically aims to increase village productivity and ultimately improve the community's economy. The existence of BUMDes in villages, if managed well, can also contribute to a large increase in Village Original Income (PADes), including in the Pruwatan Village area, Bumiayu District. This research aims to analyze the implementation of Village-Owned Enterprises (BUMDes) policies in Pruwatan Village, Bumiayu District, Brebes Regency. Descriptive qualitative methods are used to describe the implementation of Village-Owned Enterprise (BUMDes) policies. The research was conducted in Pruwatan Village, Bumiayu District, Brebes Regency. The selection of informants was carried out using a purposive sampling technique, with 5 informants selected from various elements who were considered to have knowledge about the implementation of Village-Owned Enterprise (BUMDes) policies. The implementation of the BUMDes Perintis policy in Pruwatan Village faces significant challenges despite support from the village government and BUMDes management. Communication with the village government is strong, but engagement with the community remains limited due to lack of information and trust. The BUMDes struggles with inadequate human resources and limited facilities, despite stable financial support. Improvements are needed in organizational structure and SOP implementation to better manage the complexity of BUMDes operations.

Keywords

Implementation, Policy, Village-Owned Enterprises



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan adalah sebuah proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran sebagai upaya mewujudkan tujuan kebijakan.¹ Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi

¹ Heti Aisah, Qiqi Yulianti Zaqiah, and A Supiana, "Implementasi Kebijakan Asesmen Kemampuan Minimum (AKM): Analisis Implementasi Kebijakan AKM," *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan* 1, no. 2 (2021): 128–35.

proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.² Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan - tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.³ BUMDes dirancang dengan mengedepankan peran dari Pemerintah Desa dan masyarakatnya secara lebih efektif dan proporsional.⁴ Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah-langkah yang strategis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan.⁵ Di samping itu, perlunya memperhatikan potensi lokal serta dukungan kebijakan pemerintah di atasnya untuk mengantisipasi rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa yang disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Berdasarkan data Sistem Informasi Desa per 26 Januari 2023, jumlah BUMDes di Kabupaten Brebes sejumlah 292,

² Iman Amanda Permatasari, "Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)," *The Journalish: Social and Government* 1, no. 1 (2020): 33–37; Ekonomi Sumberdaya Manusia Teori, "Kebijakan Publik," *Jogyakarta: Graha Ilmu*, 2009; Gatu Adie Pradana, "Diskresi Dalam Implementasi Kebijakan Publik (Studi Pada Implementasi Kebijakan BPJS-Kesehatan Di Puskesmas Kepanjen)," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 2, no. 3 (2016): 79–87.

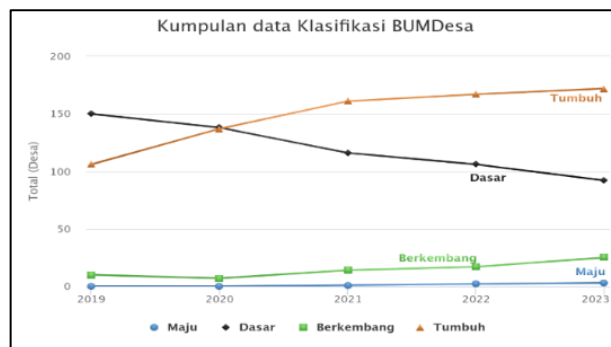
³ Amelia Sri Kusuma Dewi, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa," *Journal of Rural and Development* 5, no. 1 (2014); Valentine Queen Chintary and Asih Widi Lestari, "Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)* 5, no. 2 (2016).

⁴ Bakti Winarto, "Peranan Bumdes 'Mandiri' Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Joho, Kecamatan Purwantoro" (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO, 2017); Faradilla Ananda Safitri, Etty Susilowati, and Siti Mahmudah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Yang Belum Berbadan Hukum (Studi Di Kabupaten Semarang)," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): 1–17; Tiara Nirmala et al., "Pengembangan Smart Village Menuju Ekonomi Masyarakat Desa Mandiri Di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan," *Indonesian Collaboration Journal of Community Services (ICJCS)* 2, no. 4 (2022): 267–73.

⁵ Ardiyanto Maksimilianus Gai, Agung Witjaksono, and Riska Rahma Maulida, "Perencanaan Dan Pengembangan Desa" (Dream Litera Buana, 2020); Dewa Putu Oka Prasiasa Prasiasa, *Buku Paket Wisata Desa Wisata Baha*, vol. 1 (Pustaka Larasan, 2021).

sebanyak 172 BUMDes masuk kategori tumbuh, 92 BUMDes kategori dasar, 25 BUMDes kategori berkembang dan hanya 3 BUMDes yang sudah maju.

Berikut gambar Data Klasifikasi BUMDesa di Kabupaten Brebes.

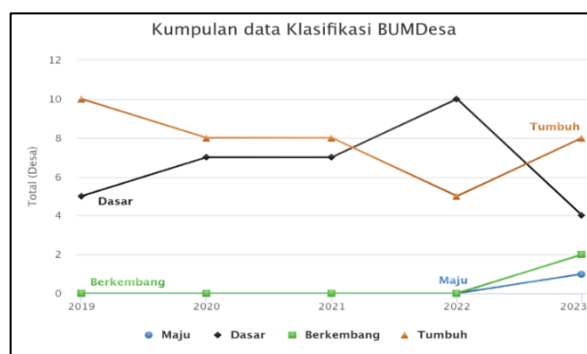


Gambar 1. Data Klasifikasi BUMDes di Kabupaten Brebes per 26 Januari 2023

Sumber : Sistem Informasi Desa Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data Sistem Informasi Desa per 26 Januari 2023, jumlah BUMDes di Kecamatan Bumiayu sejumlah 15, sebanyak 8 BUMDes masuk kategori tumbuh, 4 BUMDes kategori dasar, 2 BUMDes kategori berkembang dan hanya 1 BUMDes yang sudah maju.

Berikut gambar Data Klasifikasi BUMDesa di Kabupaten Brebes.



Gambar 2. Data Klasifikasi BUMDes di Kecamatan Bumiayu per 26 Januari 2023

Sumber : Sistem Informasi Desa Provinsi Jawa Tengah

Desa Pruwatan adalah desa yang memiliki luas wilayah paling besar, dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Bumiayu. Di Desa Pruwatan sudah terbentuk BUMDes sejak tanggal 23 Desember 2017 berdasarkan badan hukum dengan nomor AHU-08389.AH.01.33 TAHUN 2022, dengan nama Badan Usaha Milik Desa “ PERINTIS PRUWATAN “ dengan data yang sudah terverifikasi badan hukum. BUMDes ini memiliki unit usaha yang beroperasi setiap hari dan minggunya. Dalam penyusunan unit usahanya, sumber modal awal BUMDes Perintis Pruwatan mengacu pada Dana Desa APBDES. Berikut penulis sajikan unit usaha BUMDes yang ada di Desa Pruwatan.

Tabel. 1 Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa di Desa Pruwatan

No	Unit Usaha	Modal Awal	Tahun Berdiri
1	Pembuangan Sampah	Rp. 90.000.000	2017
2	Wifi	Rp. 50.000.000	2017
3	Brilink	Rp. 15.000.000	2019
4	Kios Sembako dll	Rp. 20.000.000	2018
5	Wisata	Rp. 100.000.000	2023
6	Pelayanan Pajak Kendaraan Dll.	Rp. 10.000.000	2024

Sumber : Pra Survei, 23 Juni 2024

Pertama, Usaha Pembuangan Sampah berdiri tahun 2017. Masyarakat mengumpulkan sampah di depan rumah masing-masing, lalu petugas BUMDes mengambil sampah tersebut 2x dalam seminggu. Dengan biaya Rp. 150.000/bulan untuk biaya operasional sampah. Kedua Usaha Wifi berdiri tahun 2017. BUMDes menyediakan peralatan wifi untuk dipasangkan ke pihak masyarakat/pribadi bagi yang berminat. Dengan harga pasang wifi Rp. 2.500.000, selanjutnya biaya setoran 150.000/bulan, Namun sampai saat ini masyarakat belum banyak yang berminat. Ketiga, usaha brilink melayani transfer, tarik tunai dan token listrik dengan jasa Rp. 5.000 juga melayani pulsa listrik dan pulsa All Operator. Keempat usaha kios sembako, menyediakan berbagai macam sembako dan kebutuhan rumah tangga dll. Kelima, wisata yang nantinya akan disediakan tempat mainan anak anak, track bersepeda keliling taman yang rindang, dengan aneka tanaman buah dan setiap minggunya akan di gelar hiburan musik tradisional, seperti Tembang Jawa, hadroh, gamelan jawa, calung dan qosidah. Keenam pelayanan pajak kendaraan, melalui layanan pajak yang dikelola BUMDes ini, masyarakat yang hendak membayar pajak tidak perlu datang ke Kantor Samsat yang berjarak jauh, mereka cukup datang ke kantor BUMDes. Melihat dari banyaknya unit usaha BUMDes di Desa Pruwatan berharap bisa memberikan dampak bagus bagi desa dan mampu meningkatkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, memberdayakan masyarakat desa, serta mengolah potensi desa yang ada. Meski demikian, pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes ini belum berjalan secara optimal dan masih menemui sejumlah kendala. Hal ini terlihat dari beberapa indikator pemasalahan berikut Pertama, kurangnya pembinaan dan bimbingan dari pemerintah daerah juga dukungan berupa bantuan dana financial maupun non financial. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes belum mengadakan program khusus untuk pengenalan dan pengembangan BUMDes ke Pemerintah Desa, seperti

bimbingan teknis mengenai BUMDes, pembinaan terhadap pengurus BUMDes, dan pelatihan pengelolaan BUMDes. Dengan pembinaan dan bimbingan tersebut diharapkan agar pelaksanaan BUMDes di Desa Pruwatan ini semakin berkembang. Kedua, belum efektifnya tingkat komunikasi yang terjalin antara BUMDes dengan Masyarakat Desa Pruwatan sehingga tingkat partisipasi masyarakat desa dalam turut serta mengembangkan usaha BUMDes Perintis Pruwatan masih rendah.

Implementasi Kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, Dengan tujuan khusus untuk meningkatkan integrasi dan koordinasi keberhasilan implementasi kebijakan BUMDes serta optimalisasi penggunaan sumber daya yang ada. Dalam konteks Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), implementasi kebijakan melibatkan pengembangan rencana strategi, partisipasi masyarakat serta pengelolaan sumber daya guna mengoptimalkan potensi desa, mengambil peluang ekonomi, serta memberdayakan masyarakat lokal. Hal ini agar BUMDes dapat berperan aktif dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan bersama.

Novelty penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian implementasi kebijakan badan usaha milik desa BUMDes di perdesaan, khususnya pada BUMDes di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Meskipun sudah ada beberapa penelitian terkait BUMDes di Desa lain, kajian spesifik mengenai implementasi kebijakan BUMDes, yang mencakup partisipasi masyarakat, masih terbatas. Selain itu, penelitian ini menawarkan analisis mendalam mengenai kendala dan tantangan yang dihadapi BUMDes dalam mengimplementasikan kebijakan BUMDes, terutama terkait dengan keberlangsungan fungsi Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan partisipasi masyarakat Di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.

Gap dalam penelitian ini adalah kurangnya studi yang mengevaluasi implementasi kebijakan badan usaha milik desa (BUMDes) di indonesia, khususnya BUMDes di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Sementara banyak penelitian telah menyoroti pentingnya BUMDes di sektor peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, studi mengenai implementasi kebijakan BUMDes masih minim. Selain itu, penelitian sebelumnya seringkali tidak menyentuh aspek manajemen dan perilaku pengurus BUMDes berkontribusi pada peningkatan ekonomi Desa. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada analisis implementasi kebijakan badan usaha milik desa (BUMDes) yang berpotensi peningkatan partisipasi Masyarakat di BUMDes Pruwatan.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengevaluasi implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. 2) Menyusun rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, dengan fokus pada mensejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian Desa.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perintis Pruwatan di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan 5 informan yang dipilih dari berbagai unsur yang dianggap memiliki pengetahuan tentang implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perintis Pruwatan. Unsur tersebut adalah unsur Pemerintah Desa, Pengurus BUMDes, Penelitian ini berfokus pada satu fokus penelitian, yaitu implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perintis Pruwatan di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.

Penelitian ini menggunakan teori Edward III, yang dianalisis melalui 4 variabel yaitu: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles, analisis data terdiri dari empat alur kerja yang terjadi secara bersamaan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perintis di Desa Pruwatan, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa serta kesejahteraan masyarakat. Implementasi kebijakan tersebut dianalisis berdasarkan empat dimensi utama yang diusulkan oleh Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Masing-masing dimensi ini mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan BUMDes Perintis Pruwatan.

1. Komunikasi

Komunikasi menjadi elemen kunci dalam proses implementasi kebijakan. Menurut Edward III, komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi yang jelas dari pelaku kebijakan kepada masyarakat atau penerima kebijakan. Di BUMDes Perintis Pruwatan, komunikasi dengan

pemerintah desa dan sesama pengurus BUMDes sudah berjalan dengan baik, sebagaimana terlihat dari rapat koordinasi yang rutin dilaksanakan. Namun, komunikasi dengan masyarakat belum optimal, yang terlihat dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam beberapa unit usaha BUMDes, seperti kios sembako, Wi-Fi, dan layanan Brilink.

Meskipun pengurus BUMDes telah mengadakan sosialisasi tentang program-program mereka, masyarakat masih belum terlibat secara aktif. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain kurangnya informasi yang sampai ke masyarakat, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap transparansi pengurus, serta keterbatasan waktu dan ekonomi masyarakat. Satu-satunya unit usaha yang menunjukkan partisipasi aktif masyarakat adalah unit pembuangan sampah. Oleh karena itu, komunikasi antara BUMDes dan masyarakat perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami manfaat dari kehadiran BUMDes dan lebih terlibat dalam kegiatan yang ditawarkan.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia dan non-manusia merupakan elemen penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. BUMDes Perintis Pruwatan menghadapi tantangan dalam hal sumber daya manusia, di mana pengurus BUMDes sebagian besar hanya lulusan SMA dan kurang memiliki pengalaman dalam manajemen bisnis. Beberapa pengurus bahkan merangkap sebagai kepala unit usaha, yang menunjukkan kurangnya sumber daya manusia yang memadai.

Di sisi lain, dari segi keuangan, BUMDes Perintis Pruwatan didukung oleh alokasi Dana Desa, namun distribusi dana antara unit usaha tidak merata. Meskipun tidak ada masalah yang signifikan dalam hal keuangan, fasilitas fisik yang dimiliki BUMDes masih terbatas. Banyak unit usaha, seperti layanan Brilink, Wi-Fi, dan pembuangan sampah, masih menggunakan fasilitas milik desa, sementara hanya kios sembako dan unit wisata yang memiliki fasilitas mandiri. Untuk meningkatkan efektivitas BUMDes, perbaikan dalam penyediaan sarana prasarana dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan sangat diperlukan.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan. Di BUMDes Perintis Pruwatan, sikap pengurus dan pemerintah desa terhadap pengelolaan BUMDes sudah menunjukkan komitmen yang baik. Pemerintah desa secara aktif memberikan dukungan dan arahan kepada pengurus, sementara pengurus BUMDes juga saling bekerja sama dalam menjalankan unit usaha.

Namun, disposisi dari masyarakat belum mendukung implementasi kebijakan secara optimal. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program-program BUMDes menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Padahal, peran serta masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kinerja BUMDes dan mencapai tujuan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, upaya lebih lanjut

diperlukan untuk mengedukasi dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan-kegiatan BUMDes.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi di BUMDes Perintis Pruwatan cukup sederhana, terdiri dari kepala desa, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara, dan kepala unit. Namun, struktur ini belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dari masing-masing unit usaha yang dikelola. Tidak ada pembagian tugas yang spesifik antara pengurus yang sesuai dengan kompleksitas usaha yang ada, sehingga dapat menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Penerapan Standard Operational Procedure (SOP) juga masih dalam tahap pengembangan dan penyesuaian dengan program-program BUMDes, sehingga SOP yang ada baru mencakup prosedur dasar. Selain itu, fragmentasi atau pembagian tanggung jawab antar unit usaha belum berjalan optimal karena pengurus kurang memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan dalam manajemen bisnis. Ke depan, diperlukan upaya untuk memperbaiki struktur organisasi dan SOP, serta memberikan pelatihan manajemen kepada pengurus agar pengelolaan BUMDes dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dari hasil dan pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan BUMDes Perintis Pruwatan di Desa Pruwatan berjalan dengan dukungan komunikasi yang baik antara pengurus dan pemerintah desa, namun masih memerlukan peningkatan dalam hal komunikasi dengan masyarakat. Sumber daya manusia dan fasilitas masih menjadi kendala, meskipun secara keuangan BUMDes tidak mengalami masalah. Disposisi pengurus dan pemerintah desa cukup baik, namun partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Struktur birokrasi BUMDes juga perlu disesuaikan agar mendukung kelancaran pengelolaan unit usaha yang ada.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perintis di Desa Pruwatan, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, masih menghadapi tantangan yang signifikan di beberapa aspek, meskipun secara umum ada upaya dan dukungan dari pemerintah desa dan pengurus BUMDes. Berdasarkan analisis terhadap empat dimensi utama implementasi kebijakan yang diusulkan oleh Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, ditemukan bahwa setiap aspek tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan. Dari segi komunikasi, hubungan antara pengurus BUMDes dan pemerintah desa telah terjalin dengan baik melalui rapat koordinasi rutin. Namun, komunikasi dengan masyarakat belum optimal, yang terlihat dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam beberapa unit usaha BUMDes. Meskipun sosialisasi telah dilakukan, masyarakat masih kurang

informasi dan kepercayaan terhadap pengelolaan BUMDes. Pada aspek sumber daya, pengurus BUMDes masih kekurangan sumber daya manusia yang memadai, dengan latar belakang pendidikan yang terbatas, dan sebagian besar pengurus merangkap beberapa peran. Meskipun keuangan tidak menjadi masalah besar karena dukungan Dana Desa, fasilitas fisik masih terbatas dan bergantung pada sarana milik desa. Dari perspektif disposisi, pengurus dan pemerintah desa telah menunjukkan komitmen yang baik dalam mendukung pengelolaan BUMDes. Namun, kurangnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan kebijakan. Terakhir, dalam aspek struktur birokrasi, struktur organisasi BUMDes Perintis Pruwatan masih perlu ditingkatkan. SOP yang ada belum sepenuhnya diterapkan, dan pembagian tugas antar pengurus tidak mencerminkan kompleksitas unit usaha yang dikelola.

REFERENSI

- Aisah, Heti, Qiqi Yulianti Zaqiah, and A Supiana. "Implementasi Kebijakan Asesmen Kemampuan Minimum (AKM): Analisis Implementasi Kebijakan AKM." *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan* 1, no. 2 (2021): 128–35.
- Chintary, Valentine Queen, and Asih Widi Lestari. "Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)* 5, no. 2 (2016).
- Dewi, Amelia Sri Kusuma. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa." *Journal of Rural and Development* 5, no. 1 (2014).
- Gai, Ardiyanto Maksimilianus, Agung Witjaksono, and Riska Rahma Maulida. "Perencanaan Dan Pengembangan Desa." Dream Litera Buana, 2020.
- Nirmala, Tiara, Arivina Ratih, Moneyzar Usman, and Didik Kurniawan. "Pengembangan Smart Village Menuju Ekonomi Masyarakat Desa Mandiri Di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan." *Indonesian Collaboration Journal of Community Services (ICJCS)* 2, no. 4 (2022): 267–73.
- Permatasari, Iman Amanda. "Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)." *TheJournalish: Social and Government* 1, no. 1 (2020): 33–37.
- Pradana, Gatu Adie. "Diskresi Dalam Implementasi Kebijakan Publik (Studi Pada Implementasi Kebijakan BPJS-Kesehatan Di Puskesmas Kepanjen)." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 2, no. 3 (2016): 79–87.
- Prasiasa, Dewa Putu Oka Prasiasa. *Buku Paket Wisata Desa Wisata Baha*. Vol. 1. Pustaka Larasan, 2021.
- Safitri, Faradilla Ananda, Etty Susilowati, and Siti Mahmudah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Yang Belum Berbadan Hukum (Studi Di Kabupaten Semarang)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): 1–17.
- Teori, Ekonomi Sumberdaya Manusia. "Kebijakan Publik." *Jogyakarta: Graha Ilmu*, 2009.

Winarto, Bkti. "Peranan Bumdes 'Mandiri' Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Joho, Kecamatan Purwantoro." UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO, 2017.

.